

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI KECAMATAN BARUS KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

Yudha Pratama Saragi

NPP. 29.0179

*Asdaf Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

*Fakultas Politik Perlindungan Masyarakat*

Email: [yudhasaragi5@gmail.com](mailto:yudhasaragi5@gmail.com)

**ABSTRACT**

**Problem Statment/Background (GAP):** Floods in Central Tapanuli Regency occur every year due to high rainfall, especially during the rainy season. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the role of BPBD in post-disaster rehabilitation and reconstruction and the obstacles in post-disaster rehabilitation and reconstruction as well as the efforts made in post-flood rehabilitation and reconstruction. **Method:** The research method used is descriptive qualitative and inductive approach. Collecting data using observation, interview and documentation techniques. The theory used in this thesis is the role theory according to P. Siagian where there are 5 (five) namely stabilizers, innovators, modernizers, pioneers and self-executors. The analytical technique used is to process and prepare the data for analysis, read all the data, start coding all the data, the coding process presents it back in the narrative of the qualitative report and makes interpretations. **Result :** The results show that the role of BPBD has not been maximized due to indicators that have not been fulfilled. This was due to the obstacles found in the implementation of post-disaster rehabilitation and reconstruction, including minimal competence human resources, inadequate facilities and infrastructure and limited budget. **Conclusion/suggestion:** As for the efforts made to overcome the inhibiting factors, namely by improving the quality of human resources, proposing the renewal of facilities and infrastructure and implementing an adequate budget plan. Post-disaster rehabilitation and reconstruction should be held, namely Education and Training or BIMTEK for employees in handling post-flood disasters, improving supporting facilities and infrastructure in the rehabilitation and reconstruction process and also making submissions and proposals related to the budget that is still lacking.

**Keywords:** Floods, The Role of the Regional Disaster Management Agency, Rehabilitation and Reconstruction

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah terjadinya setiap tahunnya yang diakibatkan curah hujan yang tinggi terutama pada musim penghujan. **Tujuan:** Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran BPBD dalam Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan hambatan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta upaya yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori peran menurut P. Siagian dimana terdapat 5 (lima) antara lain stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan mengolah dan mempersiapkan data untuk di analisis, membaca seluruh data, memulai coding seluruh data, proses coding menyajikan kembali dalam narasi laporan kualitatif dan membuat interpretasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD belum maksimal disebabkan adanya indikator yang belum terpenuhi. Hal tersebut disebabkan adanya ditemukan hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain sumber daya manusia minim kompetensi, sarana dan prasarana yang belum maksimal dan terbatasnya anggaran. **Kesimpulan dan Saran:** Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia mengajukan pemabaharuan sarana dan prasarana dan pelaksanaan rancangan anggaran memadai. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebaiknya yaitu agar diadakan DIKLAT atau BIMTEK pada pegawai dalam penanganan pasca bencana banjir, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan serta melakukan pengajuan dan pengusulan terkait anggaran yang masih kurang.

**Kata Kunci:** Banjir, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada umumnya bencana merefleksikan mengenai gangguan permasalahan terhadap pola kehidupan masyarakat. Bencana berdampak buruk pada struktur sosial masyarakat dan infrastruktur seperti kerusakan pada bangunan pemerintahan dan pemukiman warga. Menurut Coburn, bencana adalah kejadian mengakibatkan kerugian skala besar yang melampaui kapasitas normal berupa bentuk infrastruktur, layanan penting atau mata pencaharian, dan adanya jumlah korban serta kerugian material. Pendapat lain dikemukakan oleh Nurjanah yang menjelaskan bahwa bencana kejadian yang terjadi di luar kapasitas masyarakat atas segala sumber dayanya yang diakibatkan alam atau ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau lambat, menimbulkan kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya nyawa jiwa manusia. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian bencana menurut penulis yaitu kejadian yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dikarenakan faktor alam maupun non alam yang mengakibatkan kerusakan berbentuk infrastruktur dan struktur sosial. Banjir terjadi dikarenakan meluapnya air sehingga menutupi saluran, membuat gangguan aktivitas masyarakat yang dapat bahaya bagi

kemanusiaan dan ekonomi di Indonesia. Banjir ialah sebuah bencana musiman yang terjadi, terjadinya bencana banjir dapat terjadi bila mana tanah tidak sanggup lagi menyerap air yang disebabkan oleh rendahnya infiltrasi. Banjir juga terjadi akibat pencairan salju yang pesat, penyumbatan aliran air pada tempat lain, kenaikan permukaan air karena curah hujan di atas normal, perubahan suhu dan kegagalan bendungan. Sumatera Utara adalah daerah rentan, kejadian bencana ini di akibatkan beberapa faktor yaitu oleh letak geografis, demografis dan kemajemukan masyarakat di Sumatera Utara menyebabkan bencana seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran hutan serta bencana lainnya. Dari delapan kabupaten/kota wilayah SAR (Search and Rescue) Sumatera Utara di Sibolga, daerah paling rawan bencana yakni Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas Utara (Paluta), Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan bencana banjir dengan intensitas tertinggi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu daerah tingkat kerawanan bencana paling tinggi di Provinsi Sumatera Utara ini terjadi disebabkan memiliki letak topografinya sebagian besar berbukit-bukit dan ketinggian yang ada 0 – 1.266 m berbatasan langsung laut dengan laut sehingga disana beriklim tropis dan curah hujan sangat tinggi dengan 226 hari kemungkinan hujan/hari. Berdasarkan letak topografinya, Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki curah hujan tinggi yang berpengaruh kepada tingkat kerawanan banjir akan tinggi di kabupaten Tapanuli Tengah. Banjir bandang yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Tapanuli Tengah terutama di Kecamatan Barus pada 28 Januari 2020 disebabkan iklim yang ekstrim dengan intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Sungai Aek Siharar berada di Kecamatan Barus meluap yang berdampak kepada beberapa kecamatan lain disekitarnya. Berdasarkan tabel pada bagian sebelumnya, penulis berfokus pada bencana banjir terjadi di Kecamatan Barus, sebanyak 600 kepala keluarga terdampak banjir Kecamatan Barus dengan 21 rumah rusak berat diakibatkan kejadian banjir ini, sedikitnya akibat banjir ini membuat 1.449 warga terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian, ujar Nanda ketika dikonfirmasi lewat telepon. Penulis memilih lokus penelitian di Kecamatan Barus disebabkan Kecamatan Barus memiliki potensi bencana banjir dalam kategori tinggi. Bencana banjir yang terjadi disebabkan adanya pembalakan hutan di hulu sungai aek siharar yang berada di Kecamatan sekitar Barus sedangkan Kecamatan Barus berada di hilir muara sungai aek siharar. Bilamana ada terjadi curah hujan yang tinggi di hulu sungai maka Kecamatan Barus yang berada di hilir sungai aek siharar terdampak banjir kiriman yang membuat potensi kerusakan bencana banjir di Kecamatan Barus berpotensi tinggi. Dampak bencana banjir mengakibatkan kerugian secara material berupa kesulitan air bersih, kerusakan rumah dan hilangnya harta benda, timbulnya masalah kesehatan, kurangnya logistik dan makanan serta lumpuhnya aktivitas masyarakat. Kerugian psikologis yang terjadi akibat banjir mengakibatkan masyarakat depresi, stress, trauma dan memaksa untuk tinggal di pengungsian. Penanggulangan pasca bencana yang sering terjadi di daerah terkesan lamban dan tidak maksimal diakibat belum berwujudnya regulasi yang diturunkan dari undang-undang tentang penanggulangan bencana mengenai dukungan anggaran masih belum optimal, serta lemahnya koordinasi antar instansi.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Urgensi penyelesaian dampak bencana banjir di Kecamatan Barus dapat dijabarkan menjadi dua bagian. Pertama, banjir menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian dan perkebunan warga di Kecamatan Barus sehingga menghambat produktifitas petani. Produktifitas yang terganggu dapat mengganggu laju perekonomian dan tentunya menimbulkan masalah sosial baru di Kabupaten Tapanuli Tengah saat masyarakat tidak mendapatkan nilai ekonomis. Kedua, bencana juga membawa pengaruh buruk terhadap pembangunan daerah dan dapat menyusutkan jumlah produktifitas dalam skala besar menyebabkan kerugian financial. APBN/APBD yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dan operasional program kerja di daerah difocusing untuk dana membantu korban dampak bencana. Permasalahan financial akibat bencana banjir dapat ditangani dengan melaksanakan pemberian bantuan berupa bibit dan pupuk untuk meningkatkan produktivitas petani agar pemulihan ekonomi dapat tercapai. Menanggulangi permasalahan pasca bencana banjir di Kecamatan Barus, pemerintah telah menerbitkan Undang Undang No. 24 Tahun 2007 pada pasal 35 dan 36 memperhatikan bahwa setiap wilayah memiliki perencanaan penanggulangan bencana. BPBD dibentuk berdasarkan amanat pada pasal 35 dan 36 maka pasal 18 ayat 1 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BPBD memiliki dua unsur yaitu unsur pekasana dan unsur pengarah. BPBD memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu pengoordinasian pengelolaan penanggulangan bencana secara teragenda dan terstruktur berdasarkan kewenangannya. BPBD sebagai pengkoordinator penanggulangan bencana, BPBD memiliki tugas penanggulangan bencana berupa pra bencana seperti mitigasi bencana, anggap darurat dan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>8</sup> Peran BPBD untuk melaksanakan fungsinya pada pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah pemulihan seluruh aspek masyarakat pada pasca bencana berupa Pemulihan sosial psikologis, pemulihan fungsi pelayanan publik, pemulihan ketertiban dan keamanan, pemulihan pelayanan kesehatan serta perbaikan lingkungan sekitar. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali saran dan prasarana yang rusak disebabkan tertardampak bencana yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian pertama berjudul “Peran BPBD dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat”. Penelitian sebelumnya ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemulihan serta pembangunan kembali pada masa pascabencana di Jakarta pasca bencana kebakaran di Krukut Tamansari Jakarta Barat Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif, jika dibandingkan dengan penelitian penulis, keduanya memiliki persamaan meneliti tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, namun penelitian sebelumnya ini membahas bencana kebakaran dan berlokus lokasi di krukut Jakarta Barat sedangkan penelitian penulis membahas bencana banjir yang berlokus di Barus Tapanuli Tengah. Penelitian kedua berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enkarang Kabupaten Enrekang”. Penelitian sebelumnya ini menjelaskan bagaimana Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enkarang Kabupaten

Enrekang Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis memiliki persamaan meneliti tentang bencana banjir, namun penelitian sebelumnya lebih kepada strategi BPBD dalam menanggulangi bencana banjir sedangkan penelitian penulis fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir yang dilakukan BPBD. Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta”. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana peran BPBD dalam terjadinya bencana banjir di Provinsi Jakarta dalam pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Penelitian sebelumnya ini dengan penelitian penulis memiliki persamaan meneliti tentang bencana alam banjir dan membahas keikutsertaan peran BPBD didalamnya, namun penelitian sebelumnya memfokuskan pada implementasi pada manajemen bencana yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana dalam menghadapi bencana gempa bumi sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi dilakukan pada pasca bencana banjir.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Teori yang digunakan dalam penelitian, dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan kesamaan judul penelitian seperti judul yang diambil penulis. Namun penulis akan mengangkat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai bahan referensi dalam memperkaya bahan kajian terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.

## **II. METODE**

Menurut Hilway penelitian merupakan desain pengkajian yang dilaksanakan oleh seseorang yang sedang melakukan penyelidikan yang benar dan sempurna untuk memecahkan suatu permasalahan dengan tepat. Menurut Creswell menjelaskan bahwa pendekatan penelitian adalah rencana dan tahapan penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan anggapan-anggapan yang luas hingga cara-cara terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi. Data berdasarkan pengertian para ahli di atas, penulis menyimpulkan penelitian tidak hanya merupakan kegiatan mengumpulkan data sekali kemudian mengolahnya, tetapi juga harus memperhatikan seluruh aspek penelitian dengan harapan penelitian dapat berjalan dengan baik, baik naratif maupun holistic. Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menerapkan kaidah penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian bertujuan agar mengetahui fenomena dari apa telah dirasakan subjek penelitian (berkaitan dengan perilaku, tindakan, dan lain-lain) secara global, dan melalui deskripsi dalam bentuk ujaran dan bahasa serta konteks alam tertentu dan menggunakan berbagai metode alamiah Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian ialah sebuah usaha untuk memperoleh suatu fakta dengan sasaran dan fungsi dari penelitian tersebut, yang kemudian pada dasarnya disebut sebagai cara ilmiah dalam penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Peran BPBD dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.**

Pada Sub bab ini, dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapat menemukan beberapa informasi mengenai peran BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana banjir di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah. Informasi yang diperoleh di olah hingga sedemikian rupa agar dapat menemukan peran BPBD pada bencana tersebut. Berikut ini informasi yang diperoleh penulis mengenai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Barus. Banjir yang terjadi pada Selasa, 28 Januari 2020 yang berlokasi di Kecamatan Barus pada pukul 21.30 WIB. Penyebab banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan Sungai Sirahar Barus meluap dan merendam beberapa desa di kawasan tersebut. Banjir menyebabkan banyak warga harus mencari tempat pengungsian. Dampak bencana banjir merugikan para korban secara material dan imaterial. Pada material korban dirugikan berupa kehilangan rumah, Komunikasi, kehilangan harta benda yang terendam air. Pada imaterial korban dirugikan berupa secara psikologis, ada yang putus asa, berduka dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Dampak bencana banjir dapat diatasi dengan dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai dengan penelitian terdahulu penulis Dea Riska menyangkut tentang pentingnya peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir. Berdasarkan penelitian tersebut di jelaskan mengenai pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rehabilitasi berfungsi untuk memperbaiki dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Rekonstruksi berfungsi Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan sasaran utama Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

##### **1. Peran Sebagai Stabilisator**

Peran BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah Selaku Stabilisator yaitu menjaga stabilitas masyarakat agar aman dan tentram sehingga aktifitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan melalui program, kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai organisasi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba. untuk memberikan rasa aman tersebut kebijakan yang dilakukan BPBD adalah peningkatan kapasitas berbasis masyarakat. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bencana banjir. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini jika terjadi hujan deras, peringatan dini bertujuan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir. Dengan adanya kestabilan yang di berikan terhadap masyarakat maka bilamana ada terjadi bencana dapat di minimalisir dampak yang terjadinya. Maka untuk itu, betapa

pentingnya Peran BPBD sebagai Stabilisator dalam memberikan ketenangan melalui sosialisasi yang efektif dan pendekatan yang persuasif. Terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan. BPBD telah melaksanakan kegiatan pasca bencana dengan baik dalam dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat tetap tenang dan kondusif. Masyarakat diharapkan dapat bersabar dalam menunggu proses SOP rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan pasca bencana banjir di Barus. BPBD memiliki tanggung jawab khusus terhadap kerugian masyarakat namun BPBD berkewajiban mencegah adanya korban jiwa dan meminimalisir kerugian harta masyarakat. Namun BPBD dalam meringankan kerugian yang diderita korban bencana BPBD memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana banjir.

## **2. Peran Sebagai Inovator**

Peran sebagai Inovator yaitu peran organisasi pemerintah menciptakan ide baru menjadi sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah mekanisme baru untuk efektifitas dan efisiensi waktu, tetapi inovasi juga bisa berarti membangun dan memperbaiki solusi yang sudah ada. Salah aspek yang membutuhkan inovasi yaitu standar operasional prosedur dimana selalu membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Standar operasional prosedur merupakan suatu mekanisme Kerjasama terstruktur memuat Langkah-langkah yang akan diambil Ketika terjadi bencana, mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitisi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar insititusi tersebut. Dalam penanggulangan bencana yang membutuhkan waktu yang singkat seperti bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah, inovasi sangat diperlukan terutama inovasi sistem operasional kerja untuk mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak negatif ke masyarakat dapat diminimalisir. BPBD merupakan instansi yang aktif dalam penyusunan SOP rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir karena BPBD merupakan instansi terdepan dalam penanggulangan bencana. Standar operasional prosedur bertujuan mengharmonisasi kewenangan antar instansi dan keikutsertaan masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga tercapai efisiensi, efektifitas dan peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil wawancara tersebut menyimpulkan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah telah memiliki SOP yang masih berlaku dan sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga belum membutuhkan suatu pembaharuan yang signifikan. Dari pernyataan tersebut juga menyimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah terbuka dengan perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan atau menyalahi peraturan perundang-undangan. bahwa BPBD telah melaksanakan amanat peraturan dengan menjalankan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan yang ada. Peran BPBD dalam pemberian sebuah inovasi pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kecamatan Barus belum maksimal. Hal tersebut tampak pada rumah warga yang masih rusak belum ada bantuan dari pihak Pemerintah yang dimana BPBD berperan sebagai pengkoordinator instansi lainnya untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini dapat terjadi dikarenakan SDM di BPBD masih

minim, hal ini dapat terlihat pada jumlah pegawai analisis bencana hanya berjumlah satu orang. Ini menjadikan pelaksanaan analisa jadi lambat dikarenakan kekurangan tenaga ahli sehingga inovasi yang tercipta berada di tingkat rendah. Untuk maka diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas pada SDM di BPBD untuk menunjang percepatan perubahan dan inovasi.

### **3. Peran Sebagai Modernisator**

Sebagai organisasi pemerintah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah harus mampu bertransformasi dengan kebutuhan masyarakat baik melalui transformasi struktur organisasi, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan kebencanaan maupun perubahan paradigma di masyarakat tentang penanggulangan bencana berupa rehabilitasi dan rekonsentrasi pasca bencana banjir. Perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menitik beratkan pada penanganan respon bencana bertransformasi menjadi kesiapsiagaan. Peran BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai modernisator merupakan bagian wujud pemerintah yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dimana pemerintah dan masyarakat tidak memiliki pilihan selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan kondisi sosiologi-budaya masyarakat. Terkait modernisasi ini implementasi terhadap peran dari BPBD merujuk kepada penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis SDM. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menyadari peningkatan kapasitas pegawai sangat di perlukan terutama saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas kompetensi pegawainya BPBD berkolaborasi dengan unsur lainnya. Unsur lainnya itu berupa BNPB, TNIPOLRI dan BPBD provinsi serta SAR. Kolaborasi ini diharapkan adanya transfer ilmu dari instansi lainnya yang memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Salah satu contoh peningkatan kapasitas pegawai BPBD yaitu dengan mengadakan gladi posko dan gladi lapangan yang rutin dilaksanakan saat musim penghujan. Gladi posko dan gladi lapangan yang dilakukan bertujuan selain meningkatkan koordinasi antar instansi juga melatih kompetensi anggota BPBD dalam penanggulangan bencana banjir agar sesuai dengan standar yang ada. Masyarakat juga tidak ketinggalan untuk modernisator dalam terjadinya bencana. Dengan adanya masyarakat yang berkompeten maka diharapkan dapat menjadi inisiator bilamana terjadi suatu bencana agar dapat meminimalisir dampak bencana. Dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kegiatan BPBD yang ada. Peran BPBD sebagai modernisator tidak hanya dilakukan pada anggota BPBD saja namun kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kegiatan BPBD itu sendiri, selain itu peningkatan pengetahuan kebencanaan di masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir. Dengan meningkatnya pemahaman di masyarakat maka masyarakat dapat melihat isu-isu yang ada sebelum bencana terjadi kemudian dapat mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang telah didapat sebelumnya.

#### **4. Peran Sebagai Pelopor**

Sebagai organisasi pemerintah yang di bentuk untuk menanggulangi bencana baik pada saat pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana menjadikan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah harus dapat mengambil tindakan dan upaya yang maksimal tidak hanya ketika banjir tetapi juga meminimalisir terjadinya bencana banjir tersebut. Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan kerjasama lintas bidang, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stake holder tersebut BPBD berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang aktif mengsucceskan program-program penanggulangan bencana banjir terkhusus rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kriteria kepeloporan berdasarkan peningkatan efisensi dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah bertindak sebagai pelopor dalam penanggulangan bencana, hal ini didukung pula dengan naiknya status BPBD menjadi badan yang setingkat dengan dinas untuk mempermudah koordinasi antar badan. Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kepeloporan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu penyusunan kajian resiko bencana, kajian resiko benca dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder terkait dengan memadukan data Lembaga masing-masing. Melalui observasi yang dilakukan penulis dengan adanya kajian resiko bencana sebagai acuan Lembaga-lembaga terkait penulis mengamati bahwa BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dan stake Holder terkait menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masingmasing khususnya pada saat di lapangan. BPBD memiliki keseriusan sebagai pelopor dalam menghadapi bencana banjir dimana BPBD berusaha menjadi Lembaga pemerintah pertama yang tiba pada saat terjadi bencana. Meskipun demikian pada saat waktu yang krusial seperti pada saat tanggap darurat tidak dapat di pungkiri BPBD membutuhkan Lembaga lain seperti dinas Kesehatan dan TNI-POLRI untuk mengevakuasi masyarakat dan meminimalisir korban. Pada saat pasca bencana kebijakan BPBD sebagai kepeloporan dalam penanggulangan banjir yaitu dengan menjadi koordinator dalam pemulihan kembali dampak bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD memberikan laporan data kepada instansi terkait sehingga instansi terkait tersebut dapat melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing.

#### **5. Peran Sebagai Pelaksana Sendiri**

Kegiatan penanggulangan banjir di pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kegiatan pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah bukan semata-mata menjadi beban pemerintah. Berbagai penyebab penanggulangan bencana hanya dilakukan oleh BPBD yaitu keselamatan masyarakat, sarana prasarana yang terbatas, kompetensi yang belum memadai dari masyarakat dan tidak diminati oleh masyarakat ataupun sektor swasta. Sangat mungkin juga berbagai kegiatan yang dilakukan tidak bisa di

serahkan kepada swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini digunakan dalam penanggulangan bencana banjir, namun dari segi kuantitas dan kualitas ketersediaan sarana tersebut belum mencukupi. Hal tersebut dikarenakan ketika saat tanggap darurat banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah. BPBD harus meminta bantuan sarana prasarana tambahan kepada BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi Sumatera Utara, TNI, POLRI untuk mengevakuasi korban dan mendirikan pengungsian. Meskipun demikian seluruh anggota satuan tugas banjir, tim perahu, telah dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang lengkap. Dalam penanggulangan bencana kelengkapan sarana prasarana salah satu faktor sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut wawancara dengan kepala sub bagian umum dan kepegawaian.

### **3.2 Faktor Penghambat BPBD dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Badrus.**

Dalam upaya menjalankan peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, terdapat beberapa kendala menjadi penghambat bagi BPBD yang berasal dari internal dan eksternal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap informan. Berikut ini yang menjadi penghambat BPBD dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kecamatan Barus, yaitu:

#### **1. Sumber Daya Manusia Minim Kompetensi**

Hambatan ditemukan oleh penulis setelah melaksanakan wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dari aspek sumber daya manusia dimana SDM di BPBD belum semua memiliki pendidikan tinggi serta minimnya pegawai memiliki keahlian dalam bidang kebencanaan. Secara kuantitas pegawai BPBD sudah mencukupi tetapi tidak sejalan dengan ilmu pendidikan kebencanaan yang dimiliki. BPBD secara umum, kuantitas pegawai yang ada belum mencapai jumlah yang ideal, sedangkan pegawai BPBD yang ada untuk standar kualifikasi keahlian belum mencapai target. Adanya hambatan tersebut dapat menyebabkan terjamahnya pelaksanaan penanggulangan bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dengan baik serta sesuai SOP. Selain itu rata-rata pegawai BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah hanya memiliki keahlian yang sangat minim, hal ini disebabkan dari jenjang lulusan yang kebanyakan merupakan SLTA dimana keahlian mereka hanya terbatas sehingga masih perlu dibina dan dilatih.

#### **2. Sarana Dan Prasarana Yang Belum Memadai**

Sarana dan prasarana adalah unsur yang penting dalam pelayanan masyarakat terutama penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Tidak terpenuhinya sarana prasarana maka akan menghambat peran BPBD. Dari hasil observasi

penulis sarana prasarana Kabupaten Tapanuli Tengah masih banyak tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal tersebut terjadi diakibatkan kondisi yang sudah tua dan minimnya biaya untuk perawatan. dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi masih kurang dalam proses penanggulangan bencana banjir.

### **3. Terbatasnya Anggaran**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan oleh penulis, dapat diketahui bahwa untuk anggaran dana masih terdapat hambatan baik itu pada pelaksanaan penanggulangan bencana penulis melakukan wawancara kepada kepada ketiga Kepala Bidang yang memegang bidangnya masing-masing. BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya dalam bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sendiri belum dapat berjalan dengan maksimal karena erbatasnya anggaran salah satunya dikarenakan oleh refocussing untuk anggaran covid-19.

### **3.3 Upaya BPBD Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Badrus.**

#### **1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan banjir tidak terlepas dari sumber daya manusia agar proses pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan maksimal. langkah-langkah yang diambil BPBD untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu melaksanakan pelatihan sebagai peningkatan skill agar kualifikasi sumber daya manusia dapat meningkat. Pelatihan juga bertujuan meningkatkan standar pelayanan di BPBD dan membuka pengetahuan baru bagi para pegawai sehingga BPBD yang dulunya pasif berinovasi menjadi aktif menumbuhkan ide-ide baru.

#### **2. Mengajukan Perbaikan Sarana Dan Prasarana**

Dalam bidang sarana dan prasarana, BPBD Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah masih ada kekurangan sehingga dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tidak maksimal. BNPB berkewajiban dalam memfasilitasi sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah yang mengalami kekurangan. Oleh karena itu, BPBD terus berupaya mengajukan sarana dan prasana yang dibutuhkan kepada BNPB. BPBD juga tidak ketinggalan dalam melibatkan pihak swasta telah menyadari potensi tersebut dan merencanakan mekanisme bantuan Kerjasama swasta atau pembuatan Memory Of Understanding(MoU)

#### **3. Pelaksanaan Rancangan Anggaran Memadai**

Dalam mengatasi upaya kekurangan anggaran, BPBD haruslah berupaya agar dana tersebut dapat tercukupi untuk proses penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Dalam penggunaan dana penanggulangan bencana, BPBD menggunakan sumber dana APBD baik itu dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk tahap tanggap darurat bencana ada dana khusus berupa dana siap pakai di pusat atau BNPB. BPBD mengharapkan dengan pengajuan rancangan tersebut anggaran sesuai dengan dana program.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran BPBD untuk melaksanakan fungsinya pada pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah pemulihan seluruh aspek masyarakat pada pasca bencana berupa Pemulihan sosial psikologis, pemulihan fungsi pelayanan publik, pemulihan ketertiban dan keamanan, pemulihan pelayanan kesehatan serta perbaikan lingkungan sekitar. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali saran dan prasarana yang rusak disebabkan tertardampak bencana yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum maksimal disebabkan adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi. Indikator tersebut dapat dilihat pada peran BPBD sebagai stabilisator. BPBD dalam hal tersebut harus melakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pihak BPBD juga harus melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dengan melakukannya secara tepat dengan saling berkoordinasi dengan instansi lainnya.
2. Faktor penghambat yang di alami BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir di Kecamatan Barus yaitu masih kurangnya sumber daya manusia baik PNS maupun THL yang ada pada BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah serta keahlian dan kualifikasi yang dimiliki pegawai masih kurang dari kualifikasi standar yang seharusnya hal ini cukup menghambat BPBD dalam melaksanakan berbagai tugasnya. Selain itu hambatan yang lainnya berupa keterbatasan anggaran yang dimiliki yang disebabkan refofusing anggaran yang turut menghambat BPBD dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Adanya keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan BPBD tidak memiliki kemampuan dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana pendukung. Faktor lainnya yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan program kerja BPBD.
3. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mengatasi faktor penghambat yaitu dengan cara mengajukan penambahan anggaran agar program kerja BPBD dapat dilaksanakan serta dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya yang dimiliki BPBD. Selain itu upaya lainnya peningkatan sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan bimbingan teknologi dan pelatihan berupa gladi posko dan gladi lapangan

agar sumber daya BPBD mendapatkan transfer kompetensi dan upaya selanjutnya yaitu BPBD melaksanakan perbaikan sarana dan pra sarana yang bekerja sama dengan pihak pemerintah dan swasta.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan refrensi Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Rehabilitasi Dan Konstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

**Arah Masa Depan Penelitian: (future work):** Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Rehabilitasi Dan Konstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku-buku:**

Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya, 2008.

Creswell, J. W. *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Marbun, B. N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Martha, Evi, and Sudarti Kresno. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Nurjanah. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Siagian, Sondang. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. Vol. 8. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- 2. Jurnal Dan Skripsi**
- Carolina, Martha. “Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam Di Indonesia.” *Buletin APBN Oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI III*, no. September (2018): 3–8.
- Carter, Nick. *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: ADB, 1991.
- Coburn, A. W., R. J. S. Spence, and A. Pomonis. *Mitigasi Bencana*. Cambridge: Cambridge Architectural Research Limited, 1994.
- Heryana, Ade. “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif.” Universitas Esa Unggul, 2018.
- IDEP. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*. Jakarta: UNESCO, 2007.
- Mc Namara, Clyton. *Organizational Culture*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Pane, Masdalina, Ina Agustina Isturini, and Mugi Wahidin. “Penanggulangan Krisis Kesehatan Di Indonesia Tahun 2016.” *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* 28, no. 3 (2018): 147–56.
- Rahayu. *Banjir Dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana, 2009.
- Riantika, Henrika. “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Riska, Dea. “Peran BPBD Dalam Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca

Bencana Kebakaran Di Krukut Tamansari Jakarta Barat, 2020.”Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Sebastian, Lital. “Pendekatan Banjir Dan Penanggulangan Banjir.” *Dinamika Teknik Sipil* 8, no. 2 (2008): 162--169.

Wahyudha, Rizal. “Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Bpbd Provinsi Dki Jakarta.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

### 3. Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24. “Penanggulangan Bencana.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723*, 2007.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8. “Badan Nasional Penanggulangan Bencana.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2008.

Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11. “Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana.” In *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*, 2008.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8. “Penanggulangan Bencana Daerah.” In *Tambahan Lembaran Daerah Sumatera Utara Nomor 15*, 2013.

Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 8. “Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.” In *Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*, 2017.

### 4. Internet

Muadfan. “SAR Petakan Daerah Rawan Bencana.” rri.co.id, 2019. <https://rri.co.id/sibolga/daerah/703167/sar-sibolga-petakan-daerah-rawan-bencana>. Diakses pada 20 September 2021 pada pukul 20.00WITA

Sianturi, Arnold H. “BPBD Sumut: 1 . 449 Warga Tapanuli Tengah Masih Mengungsi.” beritasatu.com, 2020. <https://www.beritasatu.com/nasional/598081/bpbd-sumut-1449-warga-tapanuli-tengah-masih-mengungsi>. Diakses pada 21 september pada pukul 18.00 WITA